

## Evaluasi Kebijakan Publik: Pengertian, Teori Dan Karakteristik

Muhammad Yulian Alfikri<sup>1\*</sup>, Uswah Arnisyi<sup>2</sup>, Yumna Nur Azizah<sup>3</sup>, Syaiman Noerikhsan A<sup>4</sup>, Nikmatul Mawaddah<sup>5</sup>, Ahmad Taufiqul Hakim<sup>6</sup>

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[alfikmuhammad@gmail.com](mailto:alfikmuhammad@gmail.com), [uswaharnisyi@gmail.com](mailto:uswaharnisyi@gmail.com), [yumnanurazizah07@gmail.com](mailto:yumnanurazizah07@gmail.com), [syanoerikhsanap@gmail.com](mailto:syanoerikhsanap@gmail.com),  
[niamicheal34@gmail.com](mailto:niamicheal34@gmail.com), [qulhakim23@gmail.com](mailto:qulhakim23@gmail.com)

### Abstrak

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan yang berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuannya dan memberikan dampak terhadap masyarakat. Evaluasi tidak hanya menjadi alat ukur teknis, tetapi juga menjadi sarana refleksi, akuntabilitas, dan perbaikan kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji berbagai konsep dan teori evaluasi kebijakan publik, mulai dari pendekatan goal-oriented, process evaluation, theory-driven evaluation, evaluasi responsif, hingga evaluasi efektivitas dan efisiensi. Selain itu, artikel ini juga mengulas perkembangan pendekatan evaluasi dari yang bersifat teknokratik menuju partisipatif dan berbasis bukti, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di era digital. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, artikel ini menyajikan pemahaman yang komprehensif terhadap teori evaluasi kebijakan publik serta relevansinya dalam menjawab kompleksitas permasalahan kebijakan saat ini. Diharapkan kajian ini dapat menjadi referensi konseptual bagi akademisi dan pembuat kebijakan dalam menentukan pendekatan evaluasi yang tepat, kontekstual, dan adaptif terhadap perubahan.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan Publik, Teori Evaluasi, Perkembangan Evaluasi Publik

### PENDAHULUAN

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan, khususnya dalam ranah kebijakan publik. Secara etimologis, evaluasi berasal dari kata *evaluation* yang berakar dari kata *value*, yang berarti nilai. Dalam konteks administrasi publik, evaluasi dipahami sebagai proses sistematis untuk menilai manfaat, nilai, dan pencapaian suatu kebijakan atau program. Tokoh-tokoh seperti William Dunn, Stufflebeam, dan Scriven telah menekankan pentingnya evaluasi sebagai metode ilmiah yang objektif dan valid dalam mengukur keberhasilan kebijakan. Evaluasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memuat dimensi analitis dan normatif yang bertujuan memberikan informasi relevan bagi proses perumusan keputusan kebijakan di masa mendatang.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas persoalan publik dan tuntutan terhadap transparansi pemerintahan, peran evaluasi menjadi semakin strategis. Evaluasi kebijakan tidak lagi sekadar mengukur pencapaian tujuan, melainkan juga memahami proses pelaksanaan, menganalisis asumsi kebijakan, hingga menangkap persepsi masyarakat terhadap dampak kebijakan. Oleh karena itu, berbagai pendekatan evaluasi seperti evaluasi berbasis tujuan (*goal-oriented evaluation*), evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi berbasis teori (*theory-driven evaluation*), evaluasi responsif, serta evaluasi efektivitas dan efisiensi terus dikembangkan dan disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang melingkupinya.

Namun demikian, dalam praktiknya, evaluasi kebijakan publik sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Evaluasi kerap dianggap sebagai formalitas administratif belaka, bukan sebagai instrumen strategis untuk perbaikan kebijakan. Minimnya kapasitas evaluator, lemahnya sistem data, serta kurangnya partisipasi publik menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji berbagai teori evaluasi kebijakan publik, menelusuri perkembangannya, serta menyoroti pentingnya pemilihan pendekatan evaluasi yang tepat dan kontekstual demi mendorong perumusan kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis bukti.

### METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menguraikan secara sistematis konsep, teori, dan perkembangan pendekatan evaluasi kebijakan publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, interpretasi, serta dinamika konseptual dan praktis yang terkandung dalam teori-teori evaluasi kebijakan yang berkembang, khususnya dalam konteks administrasi publik di Indonesia.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini membahas 3 poin utama yang didasarkan dari referensi-referensi yang relevan dari Evaluasi Kebijakan Publik, Tiga poin tersebut yaitu : 1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik, 2. Teori Evaluasi Kebijakan Publik, 3. Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik

#### Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Bahasa Inggris "evaluasi", yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah penilaian, berasal dari kata Inggris "nilai", yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah nilai. Melakukan penaksiran (appraisal), memberi skor (rating), dan menilai (assessment) adalah semua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan produksi dan analisis informasi yang berkaitan dengan nilai dan manfaat kebijakan (Hayat, 2019).

Menurut Suchman, evaluasi adalah suatu langkah-langkah yang dilakukan untuk menjelaskan, menemukan, dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai pilihan alternatif keputusan. Stufflebeam berpendapat bahwa evaluasi adalah metode sains untuk melakukan tindakan program untuk memperoleh ukuran yang dapat dipercaya dan objektif tentang pencapaian program tersebut.

Sementara itu, Scriven mengatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menentukan apakah suatu proses berguna, bernilai, atau bernilai untuk suatu hal. istilah-istilah seperti menilai, menganalisis, mengkritik, memeriksa, menilai, memeriksa, meninjau peringkat, dan mempelajari termasuk dalam proses ini (Mergoni & De Witte, 2022). Evaluasi adalah langkah penting dalam implementasi kebijakan (Hajaroh, 2019). Halimah, evaluasi adalah proses mendapatkan penilaian baik saat kegiatan sedang berlangsung maupun saat telah berakhir. Evaluasi adalah sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan dengan cara yang teratur dan mencakup alasan mengapa suatu kebijakan berhasil atau tidak berhasil.

Menurut pemaparan yang telah disampaikan di atas, evaluasi adalah langkah penting dalam metode sains untuk melakukan proses pemeriksaan, penggambaran dan penilaian. Semua itu melibatkan berhasil dan gagal suatu kegiatan tersebut, atau berjalan dan telah berakhirnya kegiatan tersebut hingga akhirnya mendapatkan sebuah informasi yang lebih objektif dan dapat diandalkan tentang pencapaian program atau kebijakan.

Menurut keimpulan di atas Evaluasi Kebijakan ialah suatu proses menelaah dan menilai lebih banyak suatu penerapan dalam kebijakan yang berlangsung pada saat kegiatan di laksanakan atau pasca kegiatan yang bertujuan untuk memutuskan apakah suatu kebijakan itu layak untuk di lanjutkan atau tidak dengan lanjutan perbaikan atau penghentian. (Akbar & Mohi, 2018; Prabowo 2022).

Gephart berpendapat bahwa inti dari nilai adalah evaluasi. Namun, kebanyakan evaluasi lebih digunakan untuk memaparkan mengenai usaha atau langkah menemukan kebenaran tentang program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan daripada untuk mencari nilai. Evaluasi kebijakan publik adalah proses untuk mengevaluasi seberapa baik suatu kebijakan publik dapat menghasilkan hasil dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan tersebut (Muhadjir, 2008). Ada tiga kategori evaluasi, yaitu (Nugroho 2011):

- a. Evaluasi Administratif
  1. Yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
  2. Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan.
  3. Performance evaluation, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan
  4. Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan.
  5. Efficiency evaluation, penilaian terhadap program dan penilaian tentang keefektifan *cost* tersebut.
  6. Process evaluations, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program

b. Evaluasi Judicial

Merupakan evaluasi yang berkaitan dengan isu validitas hukum tempat kebijakan diterapkan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.

c. Evaluasi Politik

Penilaian sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diterapkan

### **Teori Evaluasi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Evaluasi kebijakan publik sangat penting untuk penilaian terhadap seberapa baik suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lebih dari itu, evaluasi juga menjadi alat untuk mengukur seberapa efektif, efisien, dan berdampak kebijakan terhadap masyarakat. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat memperoleh umpan balik yang objektif dan sistematis sehingga mereka dapat memperbaiki, memperbaiki, atau bahkan menghentikan kebijakan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana.

Sangat penting untuk melakukan evaluasi kebijakan dengan hati-hati. Agar proses evaluasi dapat menghasilkan informasi yang sah, akurat, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan, diperlukan pendekatan dan kerangka teoritis yang tepat. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas secara menyeluruh berbagai teori evaluasi kebijakan publik, yang banyak digunakan dalam literatur administrasi dan ilmu kebijakan Indonesia.

Karena setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan, serta konteks penerapan yang berbeda, penting bagi para perumus kebijakan, akademisi, dan pelaksana di lapangan untuk memahami teori-teori evaluasi kebijakan publik. Dengan memilih teori yang tepat, proses evaluasi kebijakan akan menjadi lebih relevan dan dapat menjawab masalah secara menyeluruh. Dibawah ini adalah beberapa teori evaluasi kebijakan publik, diantaranya:

a) Goal-Oriented Evaluation/Evaluasi berdasarkan Tujuan

Metode klasik yang paling umum digunakan adalah teori evaluasi berdasarkan tujuan. Metode ini melakukan evaluasi dengan membandingkan tujuan awal kebijakan dengan hasil yang dicapai di lapangan. Jika tujuan kebijakan tercapai secara kuantitatif, kebijakan dianggap berhasil. Dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur, evaluasi ini bersifat normative.

Untuk program yang telah memiliki indikator keberhasilan yang jelas sejak awal, evaluasi berdasarkan tujuan sangat bermanfaat (Dunn, 2003). Misalnya, jika sebuah program memiliki tujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 10% dalam waktu lima tahun, evaluasi akan mengevaluasi apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak. Metode ini kekurangan tidak mempertimbangkan variabel tambahan yang dapat memengaruhi hasil, seperti perubahan dalam situasi sosial, ekonomi, dan politik.

b) Process Evaluation/Evaluasi Berdasarkan Proses

Evaluasi proses lebih fokus pada pelaksanaan kebijakan daripada evaluasi berbasis hasil. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, prosedur, dan standar operasional yang telah ditetapkan. Ini penting untuk menemukan hambatan, kekurangan teknis, serta kapasitas kelembagaan yang mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan.

Evaluasi adalah proses yang sangat membantu untuk mengetahui kualitas pelaksanaan program, terutama pada tahap implementasi (Subarsono, 2006). Contohnya, kegagalan program pendidikan untuk mencapai targetnya dapat disebabkan bukan oleh tujuan yang salah, tetapi karena proses pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai rencana, seperti keterlambatan anggaran, kekurangan sumber daya manusia, atau kekurangan pengawasan.

c) Theory-Driven Evaluation/Evaluasi Teoritis atau Berbasis Teori

Metode evaluasi berbasis teori menilai kebijakan dengan mempelajari dan menguji teori atau asumsi yang mendasari kebijakan tersebut. Metode ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana dan mengapa suatu kebijakan dapat menghasilkan perubahan. Metode ini menyelidiki "logika internal" kebijakan, yaitu hubungan sebab-akibat antara input, proses, output, dan hasil (Winarno, 2012). Winarnp menjelaskan bahwa metode ini sangat membantu dalam mengevaluasi kebijakan.

d) Responsive Evaluation/ Evaluasi Responsif

Evaluasi responsif menggunakan metode partisipatif, kontekstual, dan lebih banyak menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya meminta pendapat pemangku kepentingan, terutama mereka yang terkena dampak langsung dari kebijakan. Dalam evaluasi responsif, kepuasan masyarakat, pengalaman, dan persepsi juga merupakan indikator keberhasilan kebijakan.

Nugroho menyatakan bahwa penilaian responsif sangat penting dalam sistem demokratis, di mana masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menilai kebijakan publik. Misalnya, evaluasi program relokasi penduduk harus mencakup lebih dari sekedar menghitung jumlah rumah yang telah dibangun; itu juga harus mempertimbangkan apakah penghuni rumah merasa nyaman, aman, dan memiliki akses ke fasilitas dasar. (Nugroho, 2014).

e) Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi

Dalam kebijakan yang melibatkan alokasi anggaran yang besar, evaluasi ini banyak digunakan. Evaluasi efektivitas mengevaluasi seberapa jauh tujuan kebijakan tercapai, sedangkan evaluasi efisiensi membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Lembaga pengawasan keuangan dan auditor independen sering menggunakan metode ini.

Agustino menjelaskan bahwa evaluasi efektivitas dan efisiensi dapat digunakan untuk menilai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, di mana pengukuran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara objektif. Namun, metode ini sering mengabaikan aspek sosial dan kultural dari kebijakan. (Nugroho, 2017).

### **Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik**

Dalam analisis kebijakan, evaluasi sangat penting dan memiliki beberapa kegunaan utama. Pertama, evaluasi memberikan informasi yang sah dan dapat dipercaya tentang kriteria kebijakan, seperti seberapa banyak tindakan publik telah memenuhi kebutuhan, nilai, dan kesempatan. Kedua, evaluasi membantu mengklasifikasi dan mengkritik nilai-nilai yang mendasari pemilih. Ketiga, evaluasi mendorong penggunaan pendekatan analisis kebijakan tambahan, seperti perumusan masalah dan saran. Merumuskan ulang masalah kebijakan atau menemukan alternatif kebijakan baru dapat dibantu dengan informasi tentang kinerja kebijakan yang kurang memadai. Evaluasi terdiri dari dua komponen yang saling terkait: penggunaan berbagai pendekatan untuk memantau hasil program, aplikasi, dan kebijakan publik serta mengevaluasi nilai hasil tersebut bagi berbagai kelompok (Bardach, 2008). Meskipun elemen-elemen ini saling berhubungan, perlu dicatat bahwa evaluasi melibatkan fakta dan premis-premis nilai dalam setiap tuntutan evaluatif. Banyak aktivitas dalam analisis kebijakan yang disebut sebagai "evaluasi" sebenarnya bersifat non-evaluatif dan lebih fokus pada produksi tuntutan designative (faktual) daripada tuntutan evaluatif. Oleh karena itu, suatu pendekatan seperti "evaluasi kebijakan" atau "penelitian evaluasi" diperlukan (Bardach, 2008).

Secara umum, kegiatan evaluasi memiliki empat ciri utama:

- a. Berpusat pada Nilai. Kegiatan evaluasi berkonsentrasi pada nilai suatu kebijakan atau apakah kepentingan atau keuntungan keberadaan suatu program terpenuhi. Kegiatan evaluasi ini tidak hanya mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan seluruh tindakan, tetapi juga tentang hasil kebijakan. Selain itu, evaluasi mencakup aspek
- b. Hubungan antara fakta dan nilai. Kegiatan evaluasi membutuhkan fakta-fakta yang memadai untuk membuktikan bahwa tindakan kebijakan telah mencapai tujuan yang diinginkan untuk individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Fakta-fakta ini juga harus menjelaskan bahwa tindakan kebijakan itu sendiri yang menyebabkan hasil yang dicapai. Akibatnya, kegiatan evaluasi harus bergantung pada hasil pemantauan.
- c. Fokus pada masa sekarang dan masa lalu. Penilaian hasil kebijakan lebih fokus pada tuntutan saat ini dan sebelumnya, berbeda dengan saran kebijakan atau peramalan yang berorientasi waktu. Akibatnya, kegiatan evaluasi bersifat retroaktif.
- d. Bernilai ganda: Nilai-nilai yang mendasari evaluasi memiliki dua kualitas: ia dapat dianggap sebagai tujuan dan cara. Selain itu, evaluasi dapat dianggap sebagai intrinsik yaitu, perlu untuk mencapai tujuannya sendiri dan ekstrinsik yaitu, karena pencapaian tujuannya berdampak pada tujuan kegiatan lainnya.

### **KESIMPULAN**

Evaluasi kebijakan publik adalah elemen penting dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu kebijakan terhadap masyarakat. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur terhadap pencapaian tujuan kebijakan, tetapi juga sebagai mekanisme refleksi dan perbaikan dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan evaluasi yang tepat memungkinkan pemerintah atau pengambil kebijakan untuk memperoleh informasi objektif dan sistematis yang sangat berguna dalam menentukan kelanjutan atau modifikasi dari kebijakan yang telah diimplementasikan.

Beragam pendekatan evaluasi seperti evaluasi berbasis tujuan, proses, teori, responsif, serta evaluasi efektivitas dan efisiensi menawarkan perspektif dan metode yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan konteks kebijakan. Perkembangan pendekatan evaluasi juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari evaluasi teknokratik menuju evaluasi yang lebih

partisipatif dan berbasis bukti. Hal ini mencerminkan pentingnya fleksibilitas metodologis dan keterlibatan berbagai aktor, termasuk masyarakat, dalam proses evaluasi kebijakan publik.

Namun, pelaksanaan evaluasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan data yang valid, serta keterbatasan dalam penerapan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori dan pendekatan evaluasi yang komprehensif menjadi sangat penting, tidak hanya bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi para pembuat dan pelaksana kebijakan. Evaluasi kebijakan yang dilakukan secara serius dan kontekstual akan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Khususnya dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Publik, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang diberikan selama proses perkuliahan dan penulisan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan seluruh rekan mahasiswa yang telah memberikan masukan serta berdiskusi bersama dalam pengembangan ide dan isi artikel ini. Tidak lupa, penulis mengapresiasi dukungan moral dan motivasi dari keluarga tercinta. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik (edisi revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik (terj. Paulus Tangkilisan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Dinamika kebijakan publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Subarsono. (2006). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: CAPS.
- Mukhlis, A. (2023). Penerapan Prinsip Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(2)
- Oktarina, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik: Evaluasi terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 11(2)
- Sedarmayanti. (2004). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-Focused Evaluation*. SAGE Publications.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A Systematic Approach*. SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*, 2020.
- Muhammad Firyal & Widya Kurniati. *Studi Evaluasi Kebijakan. Ideal Publishing*. Vol. 3, 2018.
- Warman, Warman, Laili Komariyah, and Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum. "Konsep Umum Evaluasi Kebijakan." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan* 3 (2023): 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>.
- Anggraeni, Ratih, and Soesilo Zauhar. "Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 1 (2013): 119.
- Rantung, Margareth Inof Riisyie. "Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)." *Tahta Media Group*, 2024, 1–110. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733>.
- Putri, Sukma Asmaning, and Ertien Rining Nawangsari. "Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement." *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023): 205. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8191>.